



PAUD Tak Bisa Mengandalkan Dana Insentif

KEBERADAAN lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Jogja, khususnya yang nonformal seperti Kelompok Bermain (KB), menuntut adanya kemandirian.

Tidak bisa serta merta hanya mengandalkan peran pemerintah, termasuk dalam pemberian honor kepada para pendidik KB, karena rata-rata setiap bulan mereka hanya mendapatkan Rp 100 ribu yang merupakan dana insentif dari pemerintah.

"Kalau dana insentif dapat Rp 100 ribu untuk pendidik," kata pengelola KB Candice Kids Playgroup and Daycare, Umbulharjo, Desy Maria Ulfa di sela mengikuti persiapan

acara "Gebyar Paud" se-Kota Jogja di Balai Kota Jogja, Selasa (12/12).

Dana insentif untuk para pendidik yang bersumber dari APBD Kota Jogja tersebut digelontorkan Rp 500 ribu per semester dengan syarat bagi pendidik yang telah mengikuti pendidikan dasar (diksiar).

Lalu senilai Rp 750 ribu per semester untuk pendidik yang telah mengikuti diksar lanjutan. Di Kota Jogja sendiri banyak bermunculan sekolah PAUD, terdiri dari PAUD formal tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) ada 220, sedangkan PAUD nonformal terdiri 190 KB, 78 TPA (Taman Penitipan Anak) dan 630

Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Selain dana insentif perhatian pemkot terhadap keberadaan PAUD nonformal adalah dengan memberikan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) senilai Rp 600 ribu per murid setiap tahun. Sehingga nilai yang diterima masing-masing PAUD nonformal berbeda tergantung jumlah murid. BOP diperuntukkan antara lain untuk pembiayaan pembelajaran dan bermain minimal 50 persen, untuk kegiatan pendukung 35 persen dan untuk kegiatan lainnya maksimal 15 persen.

Menurut Desi, tidak cukup bagi PAUD untuk bertahan dan berkembang jika



PENGENALAN HEWAN --Para siswa kelompok bermain mengikuti kegiatan di luar kelas pengenalan jenis-jenis hewan di Pasty Kota Jogja beberapa waktu lalu.

1.
2.
3.
4.
5.

: Lanjut

itaanggapi

iketahui

Pers

hanya mengandalkan dana insentif maupun BOP. Ia mencontohkan di KB yang dikelolanya ada delapan pendidik dengan jumlah murid 40 anak.

"Sehingga walaupun bantuan pemerintah tetap perlu tapi memang harus bisa mandiri," katanya.

Ia mengaku tidak rela jika hanya memberikan honor pendidik senilai dana insentif. Di kelompok bermain tersebut menerapkan biaya administrasi sekolah yang terjangkau.

"Kalau di tempat kami untuk biaya SPP Rp 500 ribu dan biaya pengembangan sekolah, waktu pendaftaran Rp 2 juta," katanya.

Wanita lulusan jurusan pendidikan luar sekolah UNY tersebut mengungkapkan dengan jerih payah mengembangkan KB tersebut saat ini setiap pendidik mendapatkan rata-rata Rp 600 ribu - Rp 800.

"Ya kalau dihitung-hitung mungkin masih belum layak. Namun sudah bisa jalan. Saya sendiri juga tidak terbebani karena saya jadikan sebagai sarana aktualisasi ilmu yang pernah saya dapatkan," katanya.

Ia mengatakan PAUD di Kota Jogja saat ini tumbuh pesa, sehingga diperlukan langkah-langkah kreatif untuk mengembangkan PAUD. Ia juga menaruh harapan kepada pemerintah agar kesejahteraan pendidik PAUD non formal ditingkatkan. Untuk pendidik tingkat TK memiliki kesempatan untuk mengajukan sertifikasi namun hal itu tidak berlaku untuk pengajar PAUD non formal.

"Ya harapannya sertifikasinya juga diturunkan, tapi itu juga tidak mudah," ungkapnya.

Kepala Bidang Pendidikan

non formal dan PAUD Dinas Pendidikan Kota Jogja Dedy Budiono menjelaskan di Kota Jogja terdapat 3.000 tenaga pendidik yang seluruhnya belum bisa mengakses sertifikasi dari pemerintah akibat terkendala regulasi.

Menurutnya sesuai undang-undang yang berhak mengakses program sertifikasi ialah guru di lembaga pendidikan formal yakni jenjang TK hingga SMA/SMK.

"Lembaga PAUD formal hanya TK, padahal PAUD non formal yang selama ini berjalan ada banyak," paparnya.

Jumlah guru di lembaga PAUD formal atau TK di Kota Jogja mencapai 1.700 orang. Bagi guru yang mampu mengikuti sertifikasi, memperoleh tunjangan hingga satu kali gaji. Dengan begitu, tingkat kesejahteraannya sudah terbilang mencukupi.

Sedangkan guru di lembaga PAUD non formal atau disebut pendidik, hanya mengandalkan gaji dari yayasan. Sehingga gaji yang diterimanya pun belum ideal, padahal jumlah pendidiknya jauh lebih banyak. Hal itu pula yang mendorong Dinas Pendidikan Kota Jogja menggulirkan insentif.

Sedangkan Ketua Himpunan Pendidik dan Pengelola PAUD Indonesia (Himpapudi) Kota Jogja Sri Wahyuni MSI, meski insentif bagi pendidik PAUD non formal terbilang kecil namun dirasa sangat membantu. Gebyar PAUD tingkat Kota Jogja, digelar Kamis (14/12) di Taman Pintar. Dalam acara ini panitia menargetkan 1.000 siswa yang terlibat. Kegiatan itu pun dikemas secara atraktif dengan membuka 14 pojok kreativitas sesuai kecamatan masing-masing. Selain itu ditampilkan pentas seni dari anak-anak PAUD. (age)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pendidikan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005